

Dr. Abdul Syukur

# PEREKAT BANGSA,

Pengakuan Sejarah  
Kepemudaan Indonesia



**PEREKAT BANGSA,  
Pengakuan Sejarah Kepemudaan Indonesia**

ISBN 978-979-3432-71-1

Penyusun : Dr. Abdul Syukur  
Editor : Dra. Zusiyanah Samosir

Cetakan Pertama, September 2008

**Penerbit**

**PT INTIMEDIA CIPTANUSANTARA**

(Anggota IKAPI Nomor: 059/DKI/97)

Jl. Pule No. 30 Centex Raya Ciracas Jakarta Timur 13740

☎ (021) 87780462, 87780463 Faks. (021) 8412022

e-mail: [imcn\\_office@yahoo.co.id](mailto:imcn_office@yahoo.co.id)

- **Nomor Penerbitan** : 120/IMCN/IX/08
- **Ukuran Buku** : 15,5 cm x 23 cm
- **Font/Size** : TrebuchetMS/12 point
- **Setting/Layout** : Tim IMCN
- **Design Cover** : Irwan Kuswandi

Dicetak oleh : **PT NUSANTARALESTARI CERIAPRATAMA**  
Jl. Hos Cokrosaminoto Kav. 57-58 (D/H. Jl. Ciledug Raya)  
Ciledug - Tangerang 15157  
*Isi di luar tanggung jawab percetakan*

© Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang  
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



## KATA PENGANTAR

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari para tangan penjajah kiprah pemuda sangat besar. Hal ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai awal kebangkitan pemuda Indonesia, kemudian dideklarasikannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Semua itu merupakan perekat bangsa Indonesia untuk bersatu dengan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme yang kuat untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah.

Sekarang setelah hampir 63 tahun bangsa kita dapat menikmati kemerdekaan, kita harus menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia serta bahu-membahu membangun dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Peristiwa Sumpah Pemuda harus menjadi inspirasi kita untuk menguatkan *spirit of the nation*, memperkokoh *nation and character building* dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kiprah pemuda sebelum kemerdekaan hingga mencapai kemerdekaan, ada beberapa hal yang perlu kita teladani di antaranya:

- semangat kebangsaan atau nasionalisme yang kuat;
- semangat rela berkorban bahkan jiwa dan raga;
- kesetiakawanan sosial yang tinggi; dan
- ketulusan dalam berjuang.

Buku yang berjudul *Perekat Bangsa* ini merupakan salah satu bentuk pengakuan sejarah tentang kiprah pemuda-pemuda Indonesia mulai dari kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia

untuk merebut kemerdekaan hingga tercapainya kemerdekaan serta peran atau kiprah pemuda dalam mengisi kemerdekaan, terutama dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di era global ini.

Harapan kami buku ini dapat menambah wawasan para pembaca untuk meningkatkan rasa nasionalisme berbangsa dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda.

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PEMUDA DALAM LINTASAN SEJARAH</b>	
A. Kiprah Pemuda Sebelum Kemerdekaan .....	3
B. Kiprah Pemuda Pasca Kemerdekaan .....	7
C. Kiprah Pemuda di Masa Depan .....	9
D. Membangkitkan Kembali Semangat Sumpah Pemuda .....	12
<b>BAB II</b>	
<b>PENGEMBANGAN SDM PEMUDA</b>	
A. Pemberdayaan SDM Pemuda .....	17
B. Pengembangan Keterampilan Pemuda.....	20
C. Pengembangan Akses Pendidikan Pemuda .....	21
D. Pengembangan Akses Kemitraan Pemuda .....	22
E. Pemberian Kepercayaan kepada Pemuda .....	23
<b>BAB III</b>	
<b>MEMPERKUAT SEMANGAT NASIONALISME DAN KEAGAMAAN DI KALANGAN PEMUDA</b>	
A. Gambaran Pemuda.....	27
B. Pengertian Nasionalisme.....	32
C. Memperkuat Nasionalisme di Kalangan Pemuda ..	36



D. Memperkuat Pengamalan Keagamaan di Kalangan Pemuda .....	38
E. Pentingnya Kerukunan Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional .....	40

#### **BAB IV**

##### **PEMUDA: DARI DAERAH UNTUK BANGSA**

A. Pandangan Tentang Otonomi Daerah .....	47
B. Peran Pemuda dalam Otonomi Daerah .....	54

#### **BAB V**

##### **MEMBANGUN BUDAYA DIALOG PEMUDA**

##### **SEBAGAI PEREKAT BANGSA**

A. Realitas Keragaman .....	63
B. Dialog Antar Agama .....	67
C. Dialog Etnisitas .....	70
D. Dialog Budaya .....	73
E. Membangun Dialog Antar Kelompok .....	77
F. Pendekatan Pendidikan .....	79

DAFTAR PUSTAKA .....	87
----------------------	----



**BAB I**  
**PEMUDA DALAM LINTASAN**



## BAB I

# PEMUDA DALAM LINTASAN SEJARAH

Bangsa yang bersejarah adalah bangsa yang menghormati sejarahnya  
Bangsa yang bersejarah adalah yang mampu menciptakan pemuda yang bersejarah

### **A. Kiprah Pemuda Sebelum Kemerdekaan**

Jika kita tengok sejarah, tepatnya satu abad yang lalu, yaitu pada tahun 1908, ketika itu pemuda-pemuda kreatif bangsa Indonesia mendeklarasikan sebuah organisasi dengan nama "Budi Utomo". Pada saat itu, pemuda-pemuda Indonesia begitu gigih dan tidak kenal menyerah serta tanpa rasa takut dari bayang-bayang penjajah bersatu untuk mewujudkan suatu gerakan yang lebih modern, yaitu membentuk organisasi, yang selanjutnya organisasi inilah yang menjadi lambang kebangkitan nasional.

Pada saat itu, pemuda dan masyarakat Indonesia menyadari bahwa perjuangan untuk melepaskan diri dari cengkeraman pemerintah penjajah Kolonial Belanda harus dilakukan secara bersama dengan

mengumpulkan segenap potensi. Di samping itu, perjuangan pun harus dilakukan dengan sistematis, terprogram dan dengan target-target yang rasional.

Setelah berdiri Budi Utomo, pergerakan perjuangan pemuda pun lebih *intens* dan lebih terarah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran kebersamaan sebagai satu bangsa pun semakin mengkristal dengan diadakannya Kongres Pemuda II tanggal 27-28 di Jakarta yang diakhiri dengan peristiwa pendeklarasian Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang menyatakan:

1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia
2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
3. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia

Dalam gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, peristiwa Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak bersejarah yang mampu menjiwai dan mewarnai gerakan-gerakan perjuangan, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme atau kebangsaan yang kuat. Semangat inilah yang kemudian semakin meneguhkan rasa kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia untuk secara bersama-sama membangun satu kekuatan untuk satu tujuan yaitu Indonesia Merdeka. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, agama, budaya, dan golongan masing-masing menanggalkan identitasnya untuk bersatu

padu merebut kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa sumpah pemuda semestinya menginspirasi kita untuk menguatkan *spirit of the nation*, memperkuat *nation and character building* dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin sarat dengan tantangan dan hambatan. Belakangan ini makna sumpah pemuda semakin relevan dan kontekstual dengan tantangan hidup bermasyarakat dan berbangsa yang meliputi persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan nasional.<sup>1</sup>

Pada era kemerdekaan, perjuangan pemuda pun tetap menjadi ujung tombak perjuangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang pada akhirnya membuahkan hasil dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan ini pun, para pemuda Indonesia bersama para tokoh nasional bahu-membahu membangun dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapainya dengan berbagai aktivitas, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.

Dari perjalanan atau kiprah pemuda sebelum kemerdekaan hingga mencapai kemerdekaan ini, ada beberapa hal yang patut menjadi pelajaran sekaligus keteladanan bagi kita, di antaranya:

1. **Semangat kebangsaan atau nasionalisme yang kuat**

Semangat inilah yang memudahkan ego-ego etnis,

---

<sup>1</sup> Adhyaksa Dault, *Membangkitkan Kembali Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Indonesia yang Terpuruk*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2007), h. 16

agama, suku, budaya, dan semangat primordialisme lainnya untuk bersatu padu dengan menyatakan satu Indonesia. Semangat seperti ini semestinya terus mengilhami bukan hanya kepada para pemuda semata, melainkan kepada masyarakat secara lebih luas, termasuk dari kalangan pejabat pemerintahan, politisi, pengusaha, budayawan, sineas, dan lain sebagainya. Dengan semangat kebangsaan inilah, bangsa Indonesia dapat bangkit dari berbagai keterpurukan dan mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

2. **Semangat rela berkorban bahkan jiwa dan raga**  
Setiap perjuangan tentu membutuhkan pengorbanan, dan apa yang dicontohkan oleh para pemuda dan masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan, merupakan contoh yang luar biasa dan memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa perjuangan harus selesai dengan *ending* yang menggembirakan. Dalam konteks sekarang ini, kita dituntut untuk mampu mengorbankan "ego-ego dan kepentingan" pribadi dan kelompoknya untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa kerelaan untuk berkorban, tujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia hanya akan menjadi cita-cita yang tergantung di atas awan, tanpa mampu digapainya.
  
3. **Kesetiakawanan sosial yang tinggi**  
Seperti diketahui bahwa kesetiakawanan sosial yang ditunjukkan para pemuda dan masyarakat

Indonesia saat itu merupakan contoh yang patut menjadi teladan bagi kita, untuk saling berbagi dan menolong sesama tanpa pamrih. Jika masing-masing diri kita mempunyai kerelaan untuk saling berbagi dan menolong, barangkali saudara-saudara kita yang selama ini terhimpit dengan berbagai masalah sosial terutama kesenjangan dan kemiskinan dapat lebih teratasi.

#### **4. Ketulusan dalam berjuang**

Hidup adalah perjuangan, dan perjuangan yang bermakna adalah perjuangan yang dibarengi dengan ketulusan. Sikap tulus dan ikhlas inilah yang masih jarang dimiliki oleh kalangan masyarakat kita, sehingga apapun yang dilakukannya harus dengan imbalan. Ketulusan merupakan sikap mental yang patut menjadi perhatian semua kalangan, bahkan sikap ini harus mampu menjadi budaya masyarakat kita. Sehingga masyarakat kita tidak menjadi masyarakat yang hanya mampu menuntut hak-haknya semata dengan tidak menghiraukan kewajiban yang melekat kepadanya. Sikap tulus dan ikhlas ini diwujudkan bukan hanya dalam memberi akan tetapi juga tulus dan ikhlas dalam menerima.

### **B. Kiprah Pemuda Pasca Kemerdekaan**

Berbicara tentang kiprah atau peran aktif pemuda pasca kemerdekaan, tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang menyelimuti bangsa Indonesia, baik

persoalan pemerintahan maupun yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat pemberdayaan masyarakat yang masih rendah.

Keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara lebih luas merupakan tonggak awal gerakan-gerakan kepemudaan. Para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda, baik pada tahun 1966 maupun pada tahun 1998, menunjukkan perannya dalam menggulingkan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian dikenal dengan Gerakan Reformasi.

Gerakan Reformasi pada dasarnya merupakan puncak koreksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik, ketidakadilan, serta kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada saat itu Gerakan Reformasi yang diwujudkan dengan demonstrasi besar-besaran setidaknya membawa tuntutan sebagai berikut.

1. Turunkan Soeharto
2. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya
3. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
4. Pencabutan Dwi Fungsi ABRI
5. Mempercepat pemilu yang jujur

Gerakan inilah yang pada akhirnya menumbangkan Orde Baru dengan ditandai lengsernya Presiden Soeharto dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Pada saat itu, walaupun Soeharto telah berhasil dilengserkan, akan tetapi

gerakan-gerakan pemuda yang dimotori oleh para mahasiswa secara terus-menerus menyuarakan kepentingan rakyat bahkan hingga saat ini.

Persoalan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga kini terus didengungkan, karena para pemuda masih melihat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih merajalela dan bahkan menjadi "biang keladi" keterpurukan dan kemiskinan masyarakat Indonesia.

Persoalan kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, keterpurukan ekonomi, pengangguran, penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, harga-harga yang melonjak, dan rendahnya mutu serta ketidakmerataan pendidikan juga menjadi perhatian serius kalangan pemuda hingga dewasa ini. Oleh karena itu, tidak heran jika hingga saat ini para pemuda tetap menyuarakan aspirasi-aspirasi sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap bangsa Indonesia dan masyarakat secara umum masih tetap tinggi di kalangan pemuda.

Karena perannya yang konsisten dari masa ke masa dan sikapnya yang objektif serta berpihak kepada masyarakat, para pemuda memiliki legitimasi tinggi di mata rakyat dan karena itulah hingga saat ini pemuda tetap menjadi tumpuan harapan masyarakat, dan sering diperebutkan oleh berbagai kelompok.

### **C. Kiprah Pemuda di Masa Depan**

Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap dinamika perpolitikan di tanah air, pemuda khususnya mahasiswa selalu menjadi atau dijadikan ujung tombaknya. Hal ini juga semakin menegaskan eksistensi pemuda dalam

kancah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan dewasa ini dan dalam rangka memperkuat kiprah pemuda di masa depan, maka pemuda harus mampu mengoreksi diri atas berbagai peran aktifnya. Hal ini didasarkan atas realita yang menunjukkan bahwa tidak sedikit di antara gerakan mahasiswa yang sudah tidak murni lagi sebagai gerakan moral dan gerakan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat secara lebih luas. Harus diakui bahwa adanya gerakan-gerakan atau katakanlah "demostrasi bayaran" secara langsung maupun tidak langsung telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pemuda. Ini sudah merupakan cukup bukti untuk mereposisi peran aktif mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di samping itu juga, yang dihadapi pemuda di masa depan adalah masyarakat masa depan atau masyarakat yang terbuka yaitu masyarakat yang sarat dengan kompetisi, baik pada tingkat ilmu pengetahuan maupun keterampilan (skill). Dengan ketatnya kompetisi ini telah mengharuskan peningkatan kompetensi para pemuda dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemuda Indonesia harus mampu menjadi pemuda yang unggul, yaitu pemuda yang kompetitif, berkepribadian, kreatif, inovatif, dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Hal ini juga yang pada akhirnya akan membedakan pemuda Indonesia dengan pemuda-pemuda dari negara-negara lain.

Semangat untuk melakukan pembaharuan juga merupakan ciri dari pemuda yang unggul, bahkan ia senantiasa melakukannya dengan standar kualitas yang tinggi. Ia menyadari dengan sepenuh hati, bahwa

untuk mampu *survive* dalam masyarakat masa depan harus mengedepankan kualitas. Hal ini berarti pemuda Indonesia harus mampu menjadi pemuda yang inovatif, agar mampu berkiprah di masa depan. Peter M. Drucker mengungkapkan lima prinsip inovasi, yaitu:<sup>2</sup>

1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Ini berarti, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau pemuda Indonesia memiliki kemampuan analisis.
2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat. Ini berarti pemuda Indonesia harus mempunyai persepsi terhadap kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di mana mereka hidup.
3. Inovasi haruslah bersifat simpel dan terfokus, yang berarti sederhana dan terarah serta sesuai dengan sasaran.
4. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dari ide-ide yang besar dan tidak terjangkau oleh kehidupan manusia. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai *impact* yang sangat luas terhadap kebutuhan manusia selanjutnya.
5. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau

---

<sup>2</sup> Peter M. Drucker dalam H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Terra Indonesia, 1999), cet. ke-2, h. 346



kepeloporan. Hal ini berarti bahwa hasil dari suatu inovasi harus menjadi pelopor munculnya ide-ide yang bakal berkembang.

#### **D. Membangkitkan Kembali Semangat Sumpah Pemuda**

Sudah sekitar 63 tahun Indonesia merdeka, kini negeri kita tercinta ini terus berbenah untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Dalam berbagai aspek, harus diakui bahwa Indonesia masih membutuhkan berbagai peningkatan, mulai dari bidang ekonomi, sistem pemerintahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, *tarfiking*, hingga ke persoalan pemberdayaan pemuda.

Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda merupakan bagian terpenting dari kemerdekaan yang telah diraih oleh republik ini. Hal ini merupakan fakta sejarah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemuda Indonesia telah berkiprah jauh sebelum Indonesia merdeka dan mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu pemuda-pemuda Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Ambon, dan lain sebagainya berkumpul untuk mendeklarasikan kebulatan tekadnya menjadi satu Indonesia "satu bangsa, tanah air, dan satu bahasa yaitu Indonesia".

Sejak saat itu, kiprah pemuda dalam mengawal kemerdekaan Indonesia tidak pernah berhenti bahkan hingga era reformasi seperti yang sekarang kita jalani juga tidak luput dari peran aktif para pemuda dalam

menumbangkan rezim Orde Baru. Hingga sekarang ini, pemuda Indonesia tetap tidak berhenti berkiprah. Akan tetapi dewasa ini pemuda Indonesia sedang mengalami berbagai masalah mulai dari penyalahgunaan narkoba, di mana mayoritasnya adalah pemuda, tingkat pendidikan yang masih rendah, pengangguran yang semakin bertambah, tingkat kriminalitas yang juga masih banyak dilakukan oleh pemuda, hingga pada persoalan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional yang dirasakan belum maksimal.

Di samping itu, dari sisi wawasan kebangsaan atau nasionalisme pemuda pun tergolong menurun. Oleh karena itu, hal ini patut menjadi perhatian semua kalangan, baik dari pemerintah, lembaga legislatif, kalangan pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun dari kalangan politisi. Perhatian dari semua kalangan ini menjadi sangat penting, karena akan semakin menunjukkan kepedulian bersama untuk menghasilkan langkah-langkah bersama yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi untuk mengatasi persoalan pemuda tidak dapat diserahkan hanya kepada satu institusi semata, melainkan membutuhkan langkah kolektif yang saling melengkapi, tidak berjalan sendiri-sendiri.

Seiring dengan terjadinya berbagai gejolak yang marak di berbagai daerah yang banyak dilakukan oleh para pemuda yang bahkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, ini seharusnya menjadi renungan bersama karena konflik-konflik sosial yang terjadi jika dibiarkan maka akan menyulut pada konflik yang lebih besar. Jika hal itu terjadi, maka akan semakin sulit untuk memulihkan semangat kebangsaan atau nasionalisme pemuda kita.

Menurunnya semangat kebangsaan yang melanda kaum muda ini merupakan sinyal bahwa pemuda Indonesia dalam kondisi yang harus dikuatkan kembali semangat kebangsaannya. Nasionalisme pemuda harus dibangkitkan kembali agar kiprah mereka tetap dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.



**BAB II**  
**PENGEMBANGAN SDM PEMUDA**



## BAB II

# PENGEMBANGAN SDM PEMUDA

Karya monumental suatu bangsa adalah  
kemampuannya mencetak SDM pemuda yang unggul

### **A. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan**

Secara umum, berbicara tentang organisasi kepemudaan berarti berbicara tentang perkumpulan-perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para pemuda. Dalam masyarakat, perkumpulan-perkumpulan seperti itu jumlahnya banyak, walaupun masing-masing perkumpulan tersebut tidak secara langsung menamakan dirinya sebagai organisasi kepemudaan, misalnya Koperasi Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, Ikatan Remaja Masjid, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan dan organisasi-organisasi yang anggotanya berbasis pemuda, kita harus mampu melihatnya secara komprehensif atau holistik, baik dari usia pemuda itu sendiri, faktor psikologis, peluang dan tantangannya, orientasi kegiatannya, dan

lain sebagainya. Pemberdayaan hendaknya dimaknai sebagai upaya penggalan potensi, agar dengan potensi-potensi itu para pemuda dan organisasi-organisasi dapat hidup dengan lebih baik dan pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya kemandirian. Adapun pemberdayaan-pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Membuka kemudahan akses, baik akses pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dengan kemudahan akses ini, pemuda dapat membuka dan mengawali kiprahnya dengan lebih optimis.
2. Mengadakan program-program peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan pemuda. Kemampuan bahasa ini terutama bahasa asing sebagai bahasa internasional. Keterampilan merupakan bekal utama pemuda di samping ilmu pengetahuan dan penguasaan *Information and Communication Technology* (ICT). Kemampuan bahasa dan keterampilan ini diharapkan mampu mengantarkan para pemuda Indonesia untuk mampu berkiprah pada kehidupan global
3. Membuka lapangan kerja baru. Sebenarnya persoalan banyaknya kalangan pemuda yang menjadi pengangguran bukan persoalan yang baru, melainkan sudah lama mengemuka hingga sekarang. Kondisi ini sangat disayangkan, karena usia pemuda merupakan usia produktif untuk bekerja.
4. Membuka akses bagi partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh

- swasta maupun pemerintah, sehingga mampu mengasah potensi-potensi pemuda, misalnya potensi kepemimpinan pemuda sebagai langkah untuk menyiapkan pemuda sebagai pemimpin masa depan.
5. Membuka pelatihan usaha dengan diiringi akses permodalan dan pemasaran. Biasanya yang menjadi masalah bagi para pemuda yang membuka usaha adalah persoalan modal dan pemasaran. Oleh karena itu, kedua persoalan ini hendaknya mendapat dukungan, baik dari pemerintah maupun swasta.
  6. Mengaktifkan kembali organisasi-organisasi kepemudaan. Pentingnya mengaktifkan kembali organisasi-organisasi kepemudaan ini dikarenakan dewasa ini para pemuda cenderung memilih forum-forum yang bersifat sesaat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perkumpulan-perkumpulan sejenisnya yang tidak mementingkan sisi pengkaderan.
  7. Membuka program kemitraan dan pendampingan bagi UKM yang dikelola oleh pemuda. Minimnya kerja sama dan kemitraan serta pendampingan bagi UKM yang dikelola pemuda merupakan salah satu faktor lembaga usaha tersebut tidak mampu bersaing dengan kelompok-kelompok usaha besar. Oleh karena itu, hal ini patut menjadi perhatian karena sangat berpengaruh bagi masa depan usaha yang dikelola oleh pemuda.
  8. Membuka akses informasi dan mentransformasikan perkembangan-perkembangan terkini, baik yang

menyangkut isu-isu daerah, nasional, regional, maupun internasional sehingga wawasan pemuda akan menjadi semakin luas. Dengan keluasaan akses informasi ini, pemuda dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini berarti pemuda Indonesia tidak sampai ketinggalan zaman.

## **B. Pengembangan Keterampilan Pemuda**

Setiap manusia dilahirkan dilengkapi dengan potensi atau kemampuan-kemampuan, termasuk dalam hal keterampilan. Jadi pada dasarnya pemuda telah memiliki kemampuan tersebut, tinggal bagaimana keterampilan itu dikembangkan supaya lebih bermanfaat bagi pemuda yang bersangkutan.

Keterampilan (*skill*) merupakan bekal bagi pemuda untuk mengekspresikan kemampuan-kemampuan dirinya secara lebih luas. Dengan keterampilan itu, pemuda akan mempertahankan eksistensinya dan dengan keterampilan itu pula, ia akan masuk dalam kompetisi yang terbuka dengan kelompok-kelompok lainnya.

Pentingnya pengembangan keterampilan ini juga didasarkan atas realitas yang menunjukkan bahwa banyaknya pengangguran dari kalangan pemuda. Hal ini patut menjadi perhatian, karena pada dasarnya usia mereka (pemuda) adalah usia produktif. Akan tetapi mereka terjatuh dalam lingkaran pengangguran. Ini berarti ada sesuatu yang salah dengan pemuda, paling tidak, ketidakmampuan mereka dalam bekerja merupakan bukti bahwa mereka "kalah" bersaing, dan yang menyebabkan mereka kalah bersaing adalah

karena mereka tidak memiliki keterampilan. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan merupakan kata kunci untuk terbebas dari lingkaran pengangguran.

### **C. Pengembangan Akses Pendidikan Pemuda**

Pendidikan sebagai wahana untuk memajukan pemuda beserta berbagai aspeknya. Pendidikan juga merupakan pintu bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Dengan pendidikan itu, pemuda menerima berbagai pengetahuan dan wawasan yang akan membimbingnya pada suatu keadaan di mana ia mampu berperan secara lebih maksimal.

Dilihat dari segi pendidikan, pemuda di perkotaan rata-rata lama sekolah baik pemuda laki-laki maupun perempuan mencapai lebih dari 9 tahun atau telah melebihi ketentuan Wajib Belajar 9 tahun, untuk pemuda laki-laki 10,1 tahun dan pemuda perempuan mencapai 9,8 tahun. Sedangkan untuk pemuda di daerah pedesaan, rata-rata lama sekolah mencapai 7,9 tahun untuk pemuda laki-laki dan 7,3 tahun untuk pemuda perempuan. Hal ini berarti pemuda di pedesaan belum menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun. Secara lebih lengkap, untuk di perkotaan rata-rata pemuda Indonesia tamat SLTA yaitu sekitar 44,99%, tamat SLTP 28,69%, dan SD 26,32 %. Jumlah ini bertolak belakang dengan pemuda di pedesaan, baik yang putus sekolah maupun yang tamat SD mencapai 55,24 %, tamat SLTP 28,15 %, dan pemuda yang tamat SLTA hanya 16,61%. Ini menunjukkan bahwa secara pendidikan, pemuda di pedesaan masih sangat tertinggal dengan pemuda yang ada di perkotaan, padahal jumlah pemuda di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerataan

pendidikan masih belum maksimal. Akses pendidikan di pedesaan masih lebih sulit dibandingkan di perkotaan. Untuk menyeimbangkan kondisi ini, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas, dan yang lebih penting lagi pemerataan dalam bidang mutu atau kualitas pendidikan. Oleh karena itu, akses pendidikan harus dibuka selebar-lebarnya.

#### **D. Pengembangan Akses Kemitraan Pemuda**

Siapapun orangnya, hidup pasti membutuhkan kerja sama dengan orang lain, karena itulah ciri manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Tanpa adanya kerja sama, maka hidup manusia akan terasing, dan tentunya tidak akan berkembang. Kerja sama inilah yang pada akhirnya akan menjadi modal dan kesuksesan orang dalam menjalani kehidupannya.

Masa muda merupakan gerbang awal untuk meraih kesuksesan di kemudian hari. Kesuksesan tidak mungkin dapat diraih tanpa adanya persiapan. Salah satu persiapan adalah dengan akses kemitraan atau kerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Dalam bidang ekonomi misalnya, tanpa mampu menjalin kemitraan dengan pihak lain, maka perekonomian yang ditekuni oleh pemuda tidak akan berkembang.

Adapun pola kemitraan yang dibangun harus berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam pengembangan akses kemitraan ini, pemerintah dapat memberikan jalan dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan khusus yang berpihak kepada pemuda. Oleh karena itu, pengembangan kemitraan pemuda ini harus didorong

oleh kemauan politik pemerintah. Tanpa kemauan politik dan keberpihakan kepada pemuda, mereka akan mengalami proses yang panjang untuk mencapai derajat kemajuan dan kemandirian. Oleh karena itu, dorongan dari pihak pemerintah menjadi penting.

Lagi pula, dengan membangun akses kemitraan bagi pemuda, pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsanya agar mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Mengembangkan akses kemitraan bagi pemuda harus dianggap sebagai investasi nasional, karena kenyataannya investasi ini tidak akan pernah rugi. Bangsa yang menginginkan kemajuan, tentu akan mengembangkan investasi ini, dan hanya bangsa yang tidak menyadari kelangsungan eksistensinya yang tidak melakukan investasi ini.

#### **E. Pemberian Kepercayaan kepada Pemuda**

Untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki pemuda, suatu bangsa atau masyarakat tidak bisa hanya melatih dengan sasaran atau yang menjadi objeknya adalah pemuda. Melatih bukan hanya menjadikan "yang dilatih" sebagai objek akan tetapi juga ditempatkan sebagai subjek.

Untuk melatih menjadi pemimpin, pemuda tidak bisa hanya dengan dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam kepemimpinan, akan tetapi yang lebih penting adalah mulai memberikan kepercayaan kepada pemuda untuk memimpin, walaupun dalam kapasitas kepemimpinan yang kecil.

Pemaknaan pemuda sebagai generasi penerus

kepemimpinan bangsa hanya sekedar *lips service* tanpa diberikannya kepercayaan kepada pemuda untuk memimpin. Pemberian kepercayaan ini merupakan langkah pemberdayaan yang paling efektif, karena secara langsung dapat menguji kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para pemuda.

Lagi pula, kesiapan mempersiapkan generasi (regenerasi) pada dasarnya merupakan kerelaan untuk memberikan kepercayaan kepada generasi penerusnya. Dalam hal ini, pemuda tidak bisa dianggap secara terus menerus sebagai pribadi yang labil, yang masih memerlukan proses pembelajaran. Untuk bisa stabil atau mencapai fase kestabilan, maka harus ditumbuhkan dengan cara memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh. Lagi pula proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan diberikannya kesempatan dan kepercayaan. Singkat kata, untuk membangun kemandirian pemuda, harus diawali dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan, dengan begitu para pemuda akan berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dengan lebih baik.



**BAB III**  
**MEMPERKUAT SEMANGAT NASIONALISME**  
**DAN KEAGAMAAN DI KALANGAN PEMUDA**



## BAB III

### MEMPERKUAT SEMANGAT NASIONALISME DAN KEAGAMAAN DI KALANGAN PEMUDA

Bangsa yang kuat dapat diukur  
dari kekuatan nasionalisme generasi mudanya.  
Memudarnya nasionalisme pemuda  
merupakan titik awal runtuhnya suatu bangsa.

#### **A. Gambaran Pemuda**

Jika dilihat dari sisi usia, pemuda adalah penduduk yang berusia 15 - 35 tahun, yaitu mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energi, semangat, dan kreatif untuk menciptakan semangat pembaharuan. Dengan kategori usia tersebut, maka remaja juga tergolong sebagai pemuda pada tahap-tahap awal, di samping tentunya orang-orang dewasa. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa yang rawan karena merupakan masa transisi antara masa anak-anak menuju ke masa dewasa atau masa kedewasaan.

Perubahan sosial yang penting dalam masa remaja meliputi meningkatnya pengaruh kelompok sebaya,

pola perilaku sosial yang lebih matang, pengelompokan sosial baru dan nilai-nilai baru dalam pemilihan teman dan pemimpin, dan dalam dukungan sosial. Perubahan pokok dalam moralitas selama masa remaja terdiri dari mengganti konsep-konsep moral khusus dengan konsep-konsep moral tentang benar dan salah yang bersifat umum; membangun kode moral berdasarkan pada prinsip-prinsip moral individual; dan mengendalikan perilaku melalui perkembangan hati nurani.<sup>1</sup>

Dalam tinjauan psikologis, tingkat-tingkat perkembangan dalam masa remaja dapat dibagi menjadi berbagai cara. Salah satu pembagian yang dilakukan oleh Stolz (1951) adalah sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Masa Pra-puber; satu atau dua tahun sebelum masa remaja yang sesungguhnya. Anak menjadi gemuk, pertumbuhan tinggi badan terhambat untuk sementara.
2. Masa Puber atau masa remaja; perubahan-perubahan sangat nyata dan cepat. Anak wanita lebih cepat memasuki masa ini daripada pria. Masa ini lamanya berkisar antara 2½ sampai 3½ tahun.
3. Masa Post-puber: pertumbuhan yang cepat sudah berlalu, tetapi perubahan-perubahan tetap berlangsung pada beberapa bagian badan.
4. Masa Akhir Puber; melanjutkan perkembangan sampai tercapai tanda-tanda kedewasaan.

---

<sup>1</sup> Netty Hartaty, et all, *Islam dan Psikologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 41

<sup>2</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 34

Selanjutnya, setelah masa remaja, pemuda juga masuk pada masa dewasa. Pada masa dewasa ini dibagi menjadi tiga, yaitu masa dewasa awal/muda, dewasa pertengahan, dan dewasa akhir.

Erikson mengungkapkan bahwa masa dewasa muda merupakan pengalaman menggali keintiman (*intimacy*), kemampuan untuk membaurkan identitas diri sendiri dengan identitas orang tanpa takut bahwa dirinya akan kehilangan sesuatu. Lawan dari identitas adalah isolasi, yaitu mempertahankan jarak antara diri sendiri dengan orang lain. Keseimbangan antara intimitas dengan isolasi adalah belajar melepaskan diri dari hubungan dengan orang lain dan tetap mempertahankan identitas diri. Pada masa ini masih merupakan masa yang rawan, karena ia baru mulai membaurkan dirinya dalam suatu komunitas atau kehidupan masyarakat. Sedangkan masa dewasa tengah merupakan masa produktivitas maksimum. Pada masa ini kekuatan watak yang muncul, perhatian (*care*), rasa prihatin, dan tanggung jawab yang menghargai siapa yang membutuhkan perlindungan dan perhatian. Dalam istilah religius, stagnasi dan kesia-siaan dihindari dengan melestarikan fungsinya yang bertanggung jawab dalam mengabdikan hidup dan kebudayaan yang menjadi maksud Tuhan.<sup>3</sup>

Sementara itu, masa dewasa akhir merupakan masa kematangan. Masalah sentral dalam masa ini adalah menemukan kepuasan bahwa hidup yang dijalannya merupakan penemuan dan penyelesaian pada masa tua, terjadi integrasi emosional, sehingga

<sup>3</sup> Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 84

oleh Erikson disebut sebagai pencapaian kebijaksanaan (*wisdom*). Masa dewasa akhir disebut juga dengan masa usia lanjut. Dalam masa ini nostalgia dapat menjadi sumber kekuatan dan kedamaian pribadi yang sejati. Nostalgia dapat menjadi wahana bagi orang lanjut usia untuk meninjau masa lampau guna memilih nilai-nilai, gagasan-gagasan kegiatan yang menenteramkan. Orang lanjut usia yang religius cenderung konservatif dan makin intens terlibat dalam pandangan religiusnya. Menurut Charlotta Bucher, di usia dewasa orang telah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa telah menyadari nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankannya. Orang dewasa telah memiliki identitas yang jelas dan kepribadian yang mantap.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa dewasa adalah masa seseorang yang mencapai kematangan. Mereka telah mampu berbuat yang terbaik bagi dirinya dan orang lain. Mereka juga telah memiliki tanggung jawab sosial dan mampu merencanakan hidupnya dengan lebih baik.

Dalam kapasitas seperti ini, pemuda sebagai tumpuan dan harapan masa depan bangsa. Oleh karena itu mereka dituntut untuk terus berperan aktif dalam upaya-upaya pengembangan diri dan bangsa secara lebih luas. Mahasiswa yang merupakan bagian dari pemuda, selalu terdorong untuk bersikap dinamis dan menentukan langkah hidup sesuai dengan arah logika (rasional) yang ia bangun sendiri. Oleh karena itu bagi mahasiswa, keharusan untuk mampu berfikir kritis dan berani mengambil keputusan, rupanya tidak bisa

---

<sup>4</sup> Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*....., h. 84-85

ditawar-tawar lagi. Hal ini tentunya menjadi ciri khas tersendiri bagi mahasiswa. Ia bergerak sesuai dengan hati nuraninya, bukan atas dasar kepentingan pragmatis yang memang terkadang selalu menghantuinya.

Dengan identifikasi tersebut, peran seorang pemuda dalam transformasi sosial di masyarakat menjadi sangat dominan dan sangat menentukan arah kehidupan masyarakat ke depan. Akan tetapi semuanya tetap dikembalikan kepada pemuda itu sendiri. Apakah ia memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun mental untuk melakukannya.

Pada kondisi ini pemuda dituntut untuk membekali diri dengan sikap kebangsaan dan keagamaan yang matang. Hal ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, di mana terdapat berbagai macam suku bangsa, agama, budaya, dan perilaku-perilaku sosial yang berbeda-beda. Untuk itu pemahaman kebangsaan yang benar terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada menjadi sangat penting, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku pemuda-pemuda dalam memberikan kontribusi terbaiknya terhadap bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dengan pemahaman kebangsaan yang benar, peran aktif pemuda pun akan diarahkan untuk kepentingan nasional secara lebih luas, tidak lagi dipengaruhi oleh semangat primordialisme yang tidak jarang berpotensi terhadap munculnya konflik. Kesetiaan primordialisme yang berlebihan inilah yang pada akhirnya menghambat peran aktif pemuda dalam rangka memberikan prestasi-prestasi terbaiknya bagi kejayaan bangsa.

Sebagai sosok yang kritis dan berani mengambil keputusan, pemuda dan mahasiswa memiliki landasan

asumsi bahwa dalam hidup ini mesti ada kedinamisan, yaitu suatu kondisi perubahan menuju ke arah perbaikan. Dengan asumsi ini tidak jarang para mahasiswa melakukan *pressure*, khususnya kepada pihak penguasa jika keadaan yang ada di sekelilingnya dirasakan terdapat kejanggalan-kejanggalan. Karena itu mahasiswa dapat dikatakan sebagai *agent of sosial changes*, karena keberhasilannya menjalankan peran aktif dalam transformasi sosial masyarakat sekitarnya.

Dalam hal ini, sejarah mencatat bahwa pemuda dan mahasiswa merupakan komponen bangsa yang hingga sampai saat ini masih tetap berperan dalam arena sejarah perkembangan bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa setiap beralihnya tongkat kepemimpinan nasional tidak lepas dari peran aktif para pemuda dan mahasiswa, bahkan sejak bangsa ini masih dalam cengkeraman penjajah, para pemuda dan mahasiswa sebagai anak bangsa yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi turut serta memprakarsai berdirinya Budi Utomo, lahirnya Sumpah Pemuda, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya.

## **B. Pengertian Nasionalisme**

Dewasa ini perbincangan tentang nasionalisme mulai menguat kembali, terutama ketika kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, diusiknya Blok Ambalat oleh negara tetangga hingga lepasnya kekayaan-kekayaan bangsa bahkan sumber daya nasional kepada individu-individu dan kelompok-kelompok tertentu. Masih hangat dalam ingatan kita tentang kasus BLBI yang merugikan negara hingga ratusan trilyun rupiah,

*illegal logging, illegal fishing*, dan lain sebagainya. Dari kasus-kasus ini memunculkan pertanyaan besar, di mana nasionalisme kita sebagai warga bangsa? Mengapa kekayaan-kekayaan bangsa kita hanya dinikmati oleh segilintir orang, mengapa kita diam saja? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga saat ini masih terus mengemuka dari tataran pejabat tinggi hingga masyarakat di warung-warung kopi. Sebelum kita mengkaji tentang hal tersebut, kita harus tahu dulu apa itu nasionalisme.

Pada akhir abad ke-19, istilah nasionalisme dicetuskan oleh filsuf Jerman, Herder serta Uskup Prancis Augustin de Barruel. Dalam khazanah bahasa Inggris, istilah nasionalisme baru dipakai pada tahun 1836 meskipun dalam pengertian teologis, yaitu doktrin yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa tertentu dipilih oleh Tuhan. Istilah nasionalisme cenderung diartikan sebagai egoisme nasional. Pengertian ini terus berkembang dan dewasa ini nasionalisme cenderung diartikan sebagai kebangsaan (*nationality*), kenasionalan (*nationalness*) yang semuanya berarti sebagai semangat nasional atau individualitas nasional.<sup>5</sup>

Menurut Anthony D. Smith nasionalisme merupakan ideologi politik, juga sebagai budaya politik. Sebagai ideologi politik, nasionalisme dapat dianggap sebagai agama politik yang dapat dianggap sebagai identitas nasional. Selama abad ke-20, pengertian nasionalisme terus berkembang dan penggunaannya mempunyai bermacam-macam makna, yaitu sebagai berikut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 107

<sup>6</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional.....*, h. 107

1. Nasionalisme sebagai suatu proses pembentukan atau pertumbuhan bangsa-bangsa.
2. Nasionalisme adalah sentimen atau kesadaran untuk memiliki bangsa bersangkutan.
3. Nasionalisme menandakan bahasa dan simbolisme bangsa.
4. Nasionalisme merupakan gerakan sosial politik untuk kepentingan bangsa tertentu.
5. Nasionalisme merupakan doktrin dan/atau ideologi bangsa, baik yang bersifat umum maupun yang khusus.

Ketiga pengertian yang terakhir lebih dekat dengan pengertian dewasa ini, dua pengertian yang pertama sifatnya terlalu luas, oleh karena nasionalisme bukan hanya adanya kesadaran memiliki bangsa. Nasionalisme berkaitan dengan bahasa dan simbolisme, gerakan politik, dan ideologi bangsa.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu ideologi yang menempatkan bangsa di pusat permasalahan dan berupaya untuk mempertinggi keberadaannya. Definisi ini mengandung tiga sasaran, yaitu otonomi nasional, kesatuan nasional, dan identitas nasional. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, Smith merumuskan suatu definisi kerja tentang nasionalisme, yaitu:<sup>7</sup> Nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, identitas dari

---

<sup>7</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*....., h. 108

suatu populasi yang anggota-anggotanya bertekad membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial. Di dalam definisi tersebut, terdapat konsep bangsa sebagai suatu komunitas manusia yang menyangandang suatu nama, menguasai tanah air, dan memiliki simbol-simbol berupa mitos dalam sejarah bersama, budaya publik bersama, perekonomian tunggal serta hak dan kewajiban dari anggota-anggotanya.<sup>8</sup> Dalam perjalanannya, ada beberapa faktor penting yang dapat menumbuhkan nasionalisme, yaitu:<sup>9</sup>

**1. Bahasa**

Dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang telah lama ditegaskan, yaitu sejak peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Peranan bahasa ini sangat signifikan, karena sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa.

**2. Budaya**

Peranan budaya dalam menumbuhkan nasionalisme juga sangat signifikan. Kita bisa melihat budaya Cina yang bertumpu pada paham Konfusianisme yang sangat kuat mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme Cina.

**3. Pendidikan**

Pendidikan yang menggunakan sistem sentralisasi pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat pemersatu yang sangat kuat.

<sup>8</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional.....*, h. 108-109

<sup>9</sup> H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia; Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 25

### C. Memperkuat Nasionalisme di Kalangan Pemuda

Dewasa ini kehidupan masyarakat Indonesia masih dihantui oleh menipisnya rasa kebangsaan atau nasionalisme di kalangan masyarakat itu sendiri. Berbagai konflik yang memiliki tendensi etnis, suku, agama, budaya, golongan, dan lain sebagainya masih terus mewarnai perjalanan bangsa ini. Selain itu, persoalan kesenjangan ekonomi, politik, dan status sosial lainnya pun turut menimbulkan gejolak tidak baik di masyarakat. Belum lagi munculnya berbagai persoalan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Contoh paling sederhana, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo telah menimbulkan keresahan yang jika dibiarkan tanpa adanya manajemen yang baik, akan menimbulkan konflik-konflik sosial yang dalam skala lebih luas bisa mengancam keamanan bangsa.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan sikap nasionalisme khususnya para pemuda itu sendiri. Sebesar apakah sikap nasionalisme yang tumbuh di kalangan mereka? Pertanyaan ini menjadi penting, karena bangsa ini menyandarkan dirinya pada peran aktif generasi muda. Generasi muda adalah tulang punggung negara, karena di tangan pemudalah tongkat estafet kepemimpinan nasional akan diserahkan. Dalam hal ini jika generasi mudanya tidak memiliki sikap nasionalisme yang kuat dan tangguh, maka bangsa ini akan tetap berada pada jurang disintegrasi. Ini berarti kehancuran bangsa tinggal menunggu waktu.

Dengan mencermati gejala-gejala di atas, maka langkah mendesak adalah perlunya penanaman kembali sikap kebangsaan atau nasionalisme di kalangan

pemuda, bahkan akan lebih baik lagi penanaman sikap ini dilakukan sejak dini, sejak mereka masih anak-anak, sehingga sikap tersebut terpatri dengan kuat di dada mereka yang pada akhirnya diharapkan akan tumbuh rasa nasionalisme yang kuat dan kokoh. Pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya ini adalah dengan pendidikan. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses pendidikan, bahkan sejak usia dini, mereka sudah bergelut dengan dunia pendidikan. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah dengan memasukkan penguatan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian setiap anggota masyarakat akan memperoleh materi penguatan nasionalisme.

Kegiatan menanamkan rasa kebangsaan atau nasionalisme merupakan bagian dari aktivitas bela negara (dalam skala yang lebih luas), dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara.

Upaya penguatan nasionalisme juga dapat dilakukan dengan dibudayakannya sikap saling menghormati, saling menolong sesama, memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah awal membina kerukunan hidup bernegara. Karena secara langsung maupun tidak langsung akan dapat menciptakan suasana kerukunan hidup yang harmonis yang pada gilirannya akan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi sikap nasionalisme yang kuat dan tangguh.

Berangkat dari pemikiran di atas, organisasi-organisasi kepemudaan yang merupakan bagian integral dari warga negara Indonesia, jelas merupakan wadah partisipasi aktif para pemuda khususnya dalam bidang

Sikap keagamaan pemuda dalam kasus ini berupa pandangan atau kecenderungan mental yang menetap dalam bentuk reaksi yang bersifat positif atau negatif yang tercakup dalam aspek kognisi (pemikiran), afeksi (sikap), dan konasi (kecenderungan untuk berbuat) terhadap dimensi-dimensi keagamaan, yang mencakup keyakinan dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sikap keagamaan pemuda yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pemuda melaksanakan dan menghayati ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya. Dengan sikap keagamaan yang baik tersebut maka akan mempengaruhi pemuda dalam memahami dan menjalani hidup dengan lebih baik dan tentunya akan turut aktif dalam upaya pembinaan kerukunan hidup antarumat beragama, karena tidak ada satu agama pun yang menganjurkan umatnya untuk memusuhi umat atau pemeluk agama lain, bahkan inti dari semua agama adalah perdamaian, saling mengasihi, menyayangi, dan membina kerukunan sosial.

#### **E. Pentingnya Kerukunan Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional**

Secara singkat, pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan menjadi lebih baik. Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Pembangunan juga dapat dibagi menjadi dua, pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Pembangunan fisik berkisar pada pembangunan sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat

menunjang aktivitas manusia agar menjadi lebih baik. Sedangkan pembangunan nonfisik adalah pembangunan darisidikemanusiaannya, atau katakanlah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan demikian, pembangunan diarahkan pada adanya perubahan-perubahan positif, baik secara fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini agama dapat dihubungkan dengan perubahan-perubahan sosial dalam berbagai cara. Agama dapat menjadi penggerak dan juga penunjang perubahan atau sebaliknya menjadi lawan yang tangguh dan sangat tegar bagi perubahan itu sendiri. Agama dapat secara *intens* terlibat dalam proses perubahan dan transformasi sosial di masyarakat, atau berada jauh dari pusat area perubahan yang menentukan, atau efeknya dirasakan jauh datang kemudian.

Agama tidak pernah terhindar dari persoalan keduniawian seperti percaturan politik. Adanya konsep "pemisahan gereja dari negara" adalah pencerminan dari kenyataan bahwa agama dan politik selalu berkorelasi satu sama lain sepanjang sejarah, dan menunjukkan suatu tingkat kedekatan yang perlu antara agama dan politik.<sup>10</sup>

Memang agama bukan satu-satunya faktor dalam pembangunan, karenanya tidak dapat diharapkan peranan agama akan berkembang secara mulus dan sesuai dengan harapan. Paling tidak, ia harus berinteraksi dengan faktor-faktor lain, itupun kalau ia diterima secara jujur sebagai faktor tersendiri.

<sup>10</sup> Hisanori Kato, *Agama dan Peradaban*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2002), h. 21

Konfigurasi antar faktor itulah yang menentukan corak pembangunan yang sedang kita jalani dewasa ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat lahir dan bathin.

Pembangunan nasional yang sedang digalakkan dewasa ini jelas menuntut peran aktif agama-agama untuk meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual untuk peningkatan pengamalan agama dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan.

Seperti yang diketahui bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pada kasus ini agama merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan dan motivator yang mendorong pemeluknya untuk melakukan kegiatan. Bentuk partisipasi pembangunan yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan adalah peranannya dalam transformasi dan distribusi informasi pembangunan melalui program-programnya.

Selain itu, peran yang lebih penting yang harus dimainkan oleh lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama ialah menciptakan suasana yang kondusif bagi kelancaran pembangunan. Masing-masing tokoh agama dapat memberikan kesediaan kepada para pengikutnya. Suasana yang kondusif dimaksud adalah terwujudnya kerukunan umat beragama, baik internal (sesama umat beragama), maupun eksternal (antar pemeluk suatu agama dengan

pemeluk agama yang lainnya). Atau setidaknya, lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat membuat program kerja yang mengarah pada upaya menghindari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakrukunan antar umat beragama. Hal ini penting dilakukan, karena agama juga memiliki potensi yang lain di samping untuk sebuah kerukunan. Jika agama dimaknai secara salah dengan hanya mengagungkan agamanya sendiri, tentu dengan simbolnya masing-masing justru telah memicu pelecehan terhadap agama lain, dan hal ini merupakan faktor pemicu konflik-konflik antar agama.

Jika kerukunan antar umat beragama ini tidak terwujud dengan baik, maka akan berakibat pada terjadinya gangguan dan instabilitas dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Kondisi demikian pada gilirannya akan berakibat pula pada terganggunya bahkan gagalnya pelaksanaan program pembangunan nasional di tanah air kita ini. Karena itu, untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional mutlak diperlukan terwujudnya *Trilogi Kerukunan umat Beragama*, yaitu: Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.



**BAB IV**  
**PEMUDA; DARI DAERAH UNTUK BANGSA**



## BAB IV

# PEMUDA; DARI DAERAH UNTUK BANGSA

Pemuda yang baik adalah  
yang mampu mendedikasikan kualitasnya untuk bangsa

### A. Pandangan Tentang Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks pembahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk (*interchangeably*). Kedua istilah tersebut secara akademik dapat dibedakan, akan tetapi secara praktis tidak dapat dipisahkan. Bahkan banyak kalangan yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri.<sup>1</sup>

Otonomi daerah merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>1</sup> Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Civic Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*..... h. 149

rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengkajian otonomi daerah perlu selalu dihubungkan dengan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam ruang lingkup yang lebih luas, serta dengan upaya pemantapan pemerintahan nasional. Penerapan otonomi daerah hanyalah dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan bukan dimaksudkan untuk mewujudkan negara dalam negara.<sup>2</sup>

Istilah otonomi berasal dari kata Yunani yaitu "autos" yang berarti sendiri dan nomos yang berarti perintah. Dalam pengertian ini, otonomi memiliki makna memerintah sendiri. Dalam konsep administrasi publik daerah otonomi sering disebut sebagai *local self government*. Daerah otonom praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local self state government*.<sup>3</sup>

Sedangkan istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin "de" berarti lepas dari "centrum" artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi sebab kata "de" maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Menurut perkataannya, desentralisasi ialah melepaskan dari pusat. Menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah

<sup>2</sup> Saafrudin Bahar dan A.B. Tangdililing, (penyunting), *Integrasi Nasional; Teori, Masalah, dan Strategi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h 56-57

<sup>3</sup> Tim Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat, *Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Civil Society, dan Multikulturalisme.....*, h. 184

negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut swatantra atau otonomi. Pendapat lain dari Amrah Muslimin bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah.<sup>4</sup>

Otonomi dalam pengertian sempit berarti "mandiri", sedangkan dalam pengertian yang lebih luas adalah "berdaya". Dengan demikian otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (*external intervention*).<sup>5</sup>

UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>4</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 89

<sup>5</sup> Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Civic Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*..... h. 150

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>6</sup>

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparaturnya pemerintah pusat termasuk sumber daya manusianya dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional.<sup>7</sup> Tercapainya tujuan pembangunan nasional bisa dilihat dari beberapa aspek pembangunan, seperti dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, hukum yang ditegakkan atas dasar kebenaran dan keadilan, serta dalam pembangunan ekonomi.

Dalam perspektif pemerintah Republik Indonesia, ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah, yaitu:<sup>8</sup>

1. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

---

<sup>6</sup> UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>7</sup> Yogie. S.M. et all, *Otonomi Daerah; Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2002), cet. ke-3, h. 10

<sup>8</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 192

Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada suatu pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa siapapun dalam masyarakat itu harus mendapat perlakuan yang sama, tidak memandang status sosial. Dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri, dan fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup> Adapun konsep dasar otonomi daerah, yaitu:<sup>10</sup>

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah.
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Selain itu, perlunya optimalisasi peran DPRD agar mereka lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pentingnya optimalisasi peran ini karena sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Yogie. S.M. et all, *Otonomi Daerah; Peluang dan Tantangan...*, h. 31

<sup>10</sup> Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Civic Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani...*, h. 157

<sup>11</sup> Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah; Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003), h. 59

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif.
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah.
6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

Setelah dikemukakan tujuan, konsep dasar, selanjutnya tentang visi dari otonomi daerah itu sendiri. Secara umum visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu:<sup>12</sup>

1. Bidang politik; karena otonomi merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.
2. Bidang ekonomi; ekonomi daerah pada satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan

---

<sup>12</sup> Ryaas Rasyid, et all, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke-5, h. 173-175

ekonomi nasional di daerah akan tetapi di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam hal ini pembangunan ekonomi harus diterjemahkan sebagai proses meningkatkan derajat kebebasan manusia dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Pendapatnya didasarkan pada pengamatan bahwa masalah utama negara berkembang lebih pada berkurangnya makna kehidupan (*reduced lives*) daripada rendahnya pendapatan. Karena itu, strategi yang tepat untuk mengatasi hal ini adalah meningkatkan "kebebasan" dan "kemampuan" umat manusia dalam memilih nilai sesuai yang diyakini.<sup>13</sup>

3. Bidang Sosial Budaya; otonomi daerah harus dikelola dengan sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara kesejahteraan sosial, harmoni sosial, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Dalam implementasinya, otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memerlukan pembinaan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan tidak semua pemerintah daerah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang otonomi daerah

---

<sup>13</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 28

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dalam konteks otonomi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memfasilitasi proses penyelenggaraan otonomi. Fasilitas yang dimaksud di sini adalah pemberdayaan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Sedangkan dalam konteks pengawasan, pemerintah menggunakan konsep pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah sebuah bentuk pengawasan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah pusat sebelum peraturan daerah diberlakukan. Ini berarti seluruh peraturan daerah harus minta izin dahulu pelaksanaannya kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat yang mengesahkannya. Sedangkan model pengawasan represif adalah model pengawasan yang dilakukan setelah pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan bersama pihak legislatif (DPRD). Pemerintah pusat hanya sebatas mengetahui tanpa mempunyai hak mensahkannya lagi. Peraturan-peraturan daerah dikatakan sah secara hukum jika tidak melanggar peraturan perundangan di atasnya.<sup>14</sup>

## **B. Peran Pemuda dalam Otonomi Daerah**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemuda merupakan "aset daerah" yang paling berharga, yang diharapkan

---

<sup>14</sup> Indra J. Piliang et all (ed), *Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003), h. 60-61

mampu berkiprah secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahandaerahmenujuterciptanyapemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang bersih, mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara baik dan benar, memiliki produktivitas, dan tentunya terbebas dari segala bentuk penyimpangan, misalnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sebagai aset daerah, pemuda merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemuda bisa menjadi sumber daya manusia yang menggerakkan potensi-potensi terpendam di masyarakat, seperti potensi ekonomi, potensi, kepemimpinan, potensi pengembangan usaha, potensi pendidikan, potensi pengembangan diri atau kualitas hidup, dan lain sebagainya.

Pemuda terutama mahasiswa dengan kapasitasnya sebagai insan akademis atau sebagai sosok yang terbiasa bergelut dengan nilai-nilai ilmiah dan selalu terdorong untuk bersikap dinamis dan menentukan langkah hidup sesuai dengan arah logika (rasional) yang ia bangun sendiri diharapkan mampu mentransformasikan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasiskan pemuda. Pemberdayaan ini memusatkan pada pola pengembangan potensi diri beserta kemampuan-kemampuan yang dimilikinya untuk dikembangkan dalam rangka menciptakan kemandirian masyarakat.

Peran-peran lain yang juga dapat dilakukan oleh para pemuda adalah sebagai berikut.

1. Sebagai mediator atau mampu menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dengan

masyarakat. Peran ini didasarkan pada kenyataan yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memahami program-program pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki keterbatasan akses kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemuda dapat berperan sebagai orang yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga program-program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

2. Sebagai motivator. Bagi masyarakat yang secara geografis letaknya dekat dengan pusat kota atau daerah yang dianggap ramai atau memiliki potensi yang lebih besar untuk cepat berkembang, masyarakatnya lebih memiliki motivasi untuk berkembang, maju, dan mampu hidup mandiri. Akan tetapi bagi masyarakat yang letaknya jauh bahkan terpencil, umumnya mereka hidup apa adanya, menjalani hidup seperti yang biasanya tanpa adanya gairah untuk lebih meningkatkan kapasitas diri dan kelompoknya. Mereka ini memiliki semangat hidup yang lemah. Sebagai contoh, ketika hendak diadakan pemilihan kepala daerah, bagi masyarakat terpencil, yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi, mereka umumnya tidak ambil pusing, siapapun yang akan menjadi kepala daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan semangat untuk maju. Oleh karena itu, pemuda diharapkan mampu memberikan semangat baru kepada mereka agar mereka dapat lebih optimis lagi dalam menjalani hidupnya di masa depan.

3. Sebagai partner, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Sebagai partner bagi pemerintah daerah dapat dilakukan oleh pemuda misalnya berpartisipasi memberikan masukan, seperti dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Efektivitas Kebijakan, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagai partner masyarakat khususnya dalam implementasi program-program pemerintah di masyarakat dan dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Sebagai kontrol sosial. Peran sebagai kontrol sosial ini dapat dilakukan oleh pemuda, karena pemuda merupakan kelompok yang netral atau bebas kepentingan. Ia sebagai kekuatan moral yang mampu menyuarakan yang benar dan memiliki keberpihakan terhadap rakyat.

Peran-peran sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan oleh pemuda, baik secara individual maupun secara kolektif atau tergabung dalam suatu organisasi kepemudaan. Adapun jika dilaksanakan secara kolektif atau melalui organisasi kepemudaan, peran tersebut dapat berjalan lebih efektif karena dapat berjalan lebih maksimal, di samping karena banyak memiliki Sumber Daya Manusia sehingga ada dinamisasi peran dan saling melengkapi. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, jika peran-peran tersebut dilakukan secara organisatoris adalah berkaitan dengan kemampuan organisasi tersebut. Agar menjadi organisasi yang mampu berperan, maka perlu diadakan penguatan institusional dengan cara berikut ini.

1. Penataan dalam pengelolaan atau manajemen. Selama ini banyak organisasi yang sering tidak dikelola dengan manajemen yang baik, akibatnya tidak berjalan maksimal.
2. Penguatan manajemen. Hal ini didasarkan pada banyaknya organisasi di mana manajemen yang digunakan tidak berdasarkan teori, melainkan berdasarkan pertemanan dan ambisi kepentingan.
3. Organisasi harus dianggap sebagai wahana pembelajaran, saling berbagi, dan pemberdayaan, jadi tidak dianggap hanya sebagai tempat berkumpul.
4. Perbedaan pendapat dalam organisasi harus dianggap sebagai pengayaan alternatif, tidak dianggap sebagai titik awal perpecahan.
5. Penguatan akuntabilitas atau pertanggungjawaban institusi. Secara institusi, organisasi memiliki pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat secara umum.
6. Transparansi. Transparansi dilaksanakan agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

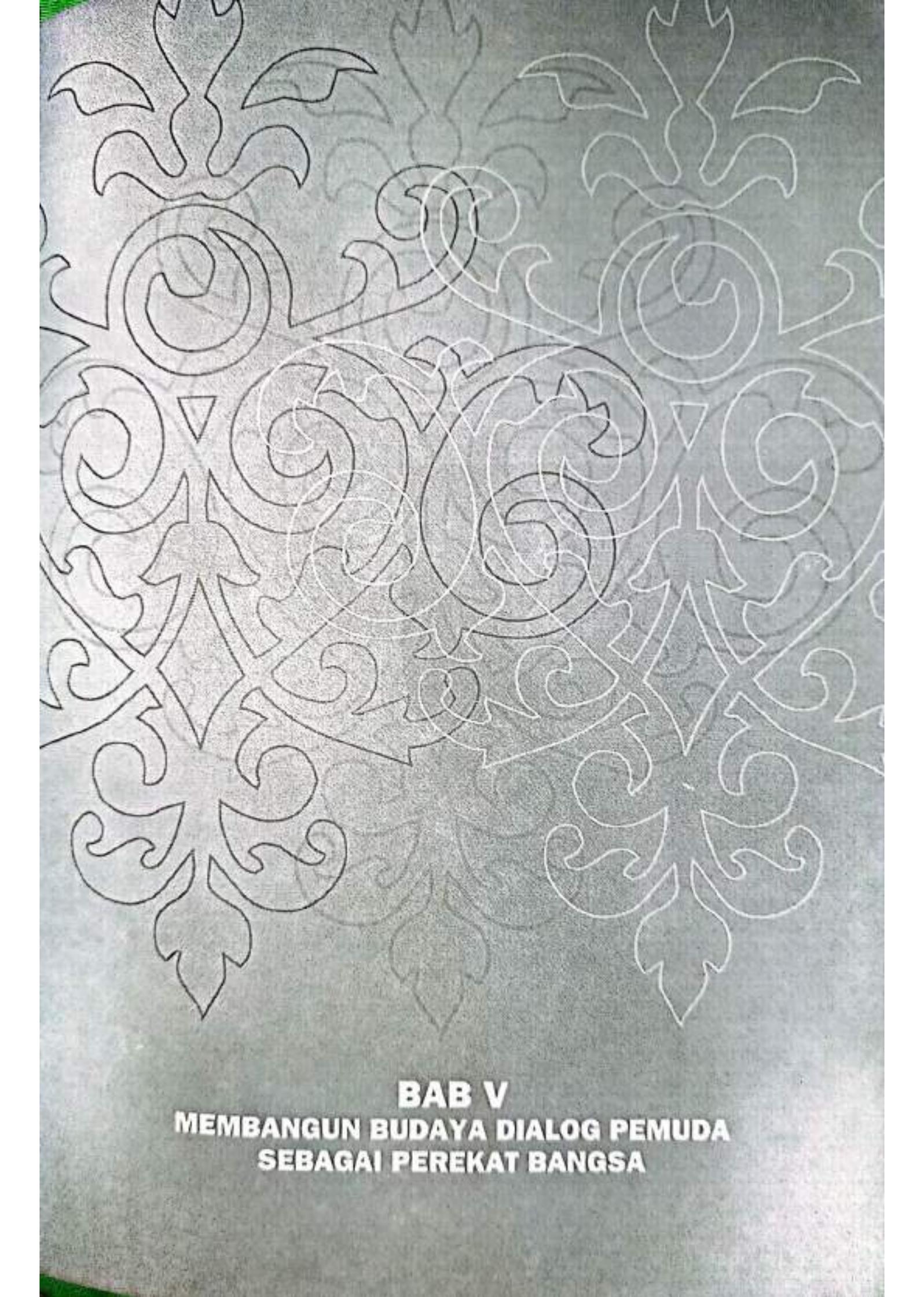
Dalam melaksanakan peran-peran sebagaimana disebutkan di atas, para pemuda perlu bahkan harus memahami otonomi daerah secara komprehensif. Mereka harus mampu memahami potensi-potensi yang bisa terjadi dalam implementasi otonomi daerah. Salah satu potensi tersebut adalah potensi konflik. Pelaksanaan otonomi daerah menyimpan sejumlah kecenderungan konflik yang signifikan. Umumnya

konflik terjadi dalam empat pola berikut ini.<sup>15</sup>

1. Pola konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pada konflik ini akan menggejala dan terjadi jika ada pemahaman dan kepentingan yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Pola konflik antara Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) dengan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang memiliki lokasi dan Sumber Daya Alam. Lebih lanjut kecenderungan konflik ini juga terutama dipicu oleh persoalan pembagian hasil eksploitasi Sumber Daya Alam setempat. Konflik ini bisa terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) dan antara Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) dengan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Selain itu, konflik juga bisa muncul antar Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) jika letak Sumber Daya Alam ada di kawasan perbatasan.
3. Konflik kemungkinan juga terjadi antara suatu perusahaan atau unit usaha yang berada di suatu daerah dengan pemerintah daerah setempat.
4. Pola konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Konflik ini terbukti banyak terjadi, misalnya karena pembuangan limbah yang mencemari lingkungan

<sup>15</sup> Indra J. Piliang et all (ed), *Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi*....., h.16

masyarakat dan rekrutmen tenaga kerja yang tidak banyak mengambil dari kalangan masyarakat setempat.



**BAB V**  
**MEMBANGUN BUDAYA DIALOG PEMUDA**  
**SEBAGAI PEREKAT BANGSA**



## BAB V

# MEMBANGUN BUDAYA DIALOG PEMUDA SEBAGAI PEREKAT BANGSA

Perekat bangsa yang sesungguhnya adalah pemuda yang memiliki semangat kebangsaan

### **A. Realitas Keragaman**

Jika kita perhatikan dengan saksama, masyarakat Indonesia yang terbentang di tengah gugusan pulau dari Sabang hingga Merauke merupakan masyarakat yang sangat heterogen dengan berbagai aneka budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural, di mana masing-masing pulau dan suku memiliki budaya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya.

Pluralitas dan heterogenitas dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Pluralitas bagi masyarakat sekarang ini seakan menjadi harga mahal yang

tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bisa dikatakan mustahil jika sebuah negara atau wilayah tidak mengalami proses pluralisasi dan heterogenisasi dalam masyarakatnya. Pluralitas bukan hanya sekedar keragaman etnis atau suku, akan tetapi dipahami sebagai keragaman pemikiran paradigma, paham kebijakan model ekonomi, aspirasi politik, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen merupakan sebuah keragaman yang menyimpan potensi besar bagi bangsa ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Bangsa kita yang terdiri dari berbagai suku memiliki adat istiadat dan keyakinan beragama yang berbeda-beda pula. Keragaman ini akan menjadi sebuah potensi yang positif jika kita mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa ini. Akan tetapi jika tidak mampu dikelola dengan baik, maka keragaman berpotensi untuk terjadinya konflik.

Dalam dunia baru, konflik-konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah konflik antar kelas sosial, antara golongan kaya dengan golongan miskin, atau antara kelompok-kelompok (kekuatan) ekonomi lainnya, akan tetapi konflik antara orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda. Pertikaian antar suku dan konflik-konflik antar etnis – dalam konteks peradaban – akan senantiasa terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur; Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), h. 68

<sup>2</sup> Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, terj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2002), cet. ke-4, h. 9.

Dalam kondisi masyarakat yang heterogen sebagaimana digambarkan di atas, peran tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh etnis sangat penting. Sebagai pemuka kelompok, tokoh masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, tercipta sikap saling menghormati antar berbagai individu dan kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam masyarakat demokratis pula, heterogenitas masyarakat atau pluralisme dipahami secara benar, seperti berikut ini.

1. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, heterogen, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, bahasa, dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme akan dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme juga sebagai suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme perawatan, pengawasan, dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam kondisi ini, kebahagiaan sejati dari masyarakat yang heterogen adalah jika kita mampu menghormati orang lain sebagaimana kita menghargai diri sendiri.
2. Pluralisme merupakan pengakuan tulus dan ikhlas dari adanya kebhinekaan atau keragaman. Bukan hanya sekedar slogan atau direduksi menjadi ke-

*eka-an* dengan doktrin *uniformity*-nya, akan tetapi kebhinekaan atau keragaman harus dipahami sebagai keniscayaan, karena tidak ada yang dapat menghilangkan kebhinekaan. Kebhinekaan sudah merupakan kenyataan sejarah yang harus mampu dikelola menjadi sumber kekuatan kemanusiaan.

3. Pluralitas dan heterogenitas dalam berbagai pengertian tidak memberi kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengklaim bahwa kelompok pikiran, paradigma, paham, kebijakan model ekonomi, aspirasi politik, dan sebagainya menjadi panutan bagi pihak lain. Dalam kondisi yang plural ini berbagai keragaman tersebut tetap mendapatkan penghargaan masing-masing. Koleksitas keragaman masing-masing dipahami sebagai potensi tinggi tanpa menghilangkan hak dan harkat masing-masing.<sup>3</sup>
4. Dengan berbeda, terjadi dinamisasi kehidupan masyarakat yang terbentuk melalui interaksi positif, dengan bersama-sama saling menghormati dan memperlakukannya secara manusiawi. Perbedaan bukan untuk dihilangkan, akan tetapi dipelihara sebagai sumber kemajuan peradaban manusia. Dengan perbedaan itulah, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih maju dan berkembang.

---

<sup>3</sup> Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur; ...*, h. 68-69

## **B. Dialog Antar Agama**

Dalam beberapa tahun belakangan ini, bahkan tidak hanya di Indonesia melainkan di berbagai negara, kita sering dikejutkan oleh serangkaian peristiwa kekerasan dan aksi-aksi anarkhis yang melibatkan para pemeluk agama. Di negara kita sendiri, peristiwa-peristiwa tersebut sering terjadi di tempat-tempat wisata bahkan di tempat-tempat ibadah.

Mencermati perkembangan keagamaan dan hubungan antar agama di Indonesia, seakan kita sampai pada kesimpulan ekstrim yang mengatakan bahwa agama "tidak mampu" melahirkan masyarakat yang harmonis, aman, apalagi kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konflik-konflik yang mengatasnamakan agama atau kepercayaan tertentu.

Disadari ataupun tidak, konflik-konflik yang terjadi akibat sentimen keagamaan telah mengakibatkan hilangnya rasa aman di kalangan warga masyarakat bahkan terkadang hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan yang tidak jelas dan bahkan sepele, konflik sudah berkecamuk dengan hebat. Pendek kata, persoalan kecil akan mudah menjadi besar dikarenakan faktor agama.

Berbagai upaya dan terapi telah diujicobakan namun hasilnya masih belum memuaskan harapan, baik pelaku, intensitas, waktu, maupun tempat di mana konflik tersebut terjadi. Di Indonesia sendiri, maraknya berbagai kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah bukti bahwa agama dianggap masih belum mampu menjadi payung kedamaian bagi umatnya. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut benar-benar dikarenakan faktor agama, ataukah dikarenakan

kurangnya pemahaman umat terhadap agamanya.

Berangkat dari pertanyaan di atas, nampaknya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan sikap saling memusuhi antar sesamanya. Pendek kata, tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya tentang anjuran sikap kekerasan, walaupun ada, ajaran agama tersebut adalah sesat dan menyesatkan.

Semua agama mengajarkan prinsip dasar saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai antar sesama manusia. Jika umat beragama mengabaikan prinsip dasar tersebut atau menjadikan agama sebagai legitimasi terhadap tindak kekerasan dan kekejaman terhadap sesama manusia, ini berarti telah mengingkari nilai paling pokok dari ajaran agama itu sendiri, yaitu nilai *rahmatan lil alamin* atau kasih sayang bagi alam semesta.<sup>4</sup>

Agama sering menempatkan diri di tengah-tengah konflik dan kontroversi. Orang mungkin berpikir bahwa agama adalah sesuatu untuk dicela, kalau tidak ditolak. Akan tetapi sama sekali bukan suatu sikap yang seimbang untuk menyimpulkan bahwa agama hanya membawa "gejala yang tidak dikehendaki" kepada masyarakat manusia. Agama sama sekali bukan beban sosial; agama pastilah menimbulkan "gejala yang dikehendaki" dalam masyarakat manusia, seperti penguatan stabilitas politik, aktualisasi dari aspirasi masyarakat, bahkan mengendurnya keputusan rakyat.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam, Dilema Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), h. 168

<sup>5</sup> Hisanori Kato, *Agama dan Peradaban*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2002), h. 2-3

Agama juga dapat mempunyai kekuatan positif dalam menggerakkan transformasi sosial, tetapi dapat juga menyebabkan konflik sosial apabila tidak disadari akan bahaya-bahaya inklusivisme yang menggunakan lambang-lambang agama untuk kepentingan masyarakat yang eksklusif.<sup>6</sup>

Dengan mencermati fenomena di atas, maka diperlukan dialog yang intensif, baik antar agama maupun intern umat dalam satu agama. Pentingnya dialog ini didasarkan atas realitas yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut Dasar Negara Pancasila, yang mengakui beberapa agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di antara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama terbesar, bahkan kalau dilihat dari segi penganutnya, umat Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Di lihat dari pengertian agama, para sosiolog berbeda penafsiran tentang agama. Dalam hal ini Beckford mengungkapkan tiga jenis sosiolog, yaitu mereka yang berpikir bahwa agama berfungsi untuk mempersatukan masyarakat, mereka yang berpikir bahwa agama adalah topeng yang perlu untuk menyamarkan kekuatan pendorong yang sebenarnya dari kelanjutan serta perubahan masyarakat, mereka yang menganggap agama sebagai suatu sumber daya simbolis/organisasi yang dapat diambil untuk menyesuaikan dengan kepentingan bagian-bagian tertentu suatu masyarakat.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), h. 36

<sup>7</sup> Hisanori Kato, *Agama dan Peradaban.....*, h. 22-23

Menurut Durkheim, agama bukan hanya suatu sistem gagasan, di atas segala-galanya agama adalah sistem kekuatan. Hal ini berarti agama sebagai suatu instrumen aktual untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi sosial. Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa hampir semua lembaga sosial besar lahir dalam agama. Sekarang agar aspek pokok untuk kehidupan kolektif ini dapat dimulai hanya dengan aspek-aspek kehidupan keagamaan yang berbeda-beda, jelas perlu bahwa kehidupan keagamaan merupakan bentuk yang unggul dan sebagaimana adanya, merupakan ungkapan terkonsentrasi dari seluruh masyarakat. Kalau agama telah melahirkan semua yang terpenting dalam masyarakat, itu disebabkan oleh ide mengenai masyarakat adalah jiwa dari agama. Oleh karena itu, kekuatan keagamaan adalah kekuatan manusia juga kekuatan moral.<sup>8</sup>

### **C. Dialog Etnisitas**

Pentingnya dialog etnisitas ini didasarkan atas realitas bangsa Indonesia yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Di antara etnis tersebut, ada yang hidup berdampingan secara damai dan harmonis, ada pula yang tidak harmonis. Ini merupakan kenyataan yang ada di sekitar kita dan tidak bisa terbantahkan, bahkan bukan tidak mungkin, ada di antara individu yang satu etnis dengan kita sedang tidak harmonis dengan individu dari etnis yang berlainan. Kondisi ini harus mampu dicermati secara

---

<sup>8</sup> Hisanori Kato *Agama dan Peradaban*....., h. 23

bijaksana, karena tidak jarang konflik antar individu berubah menjadi konflik antar etnis.

Konflik antar etnis ini biasanya sangat mudah dimunculkan, karena etnis merupakan salah satu identitas seseorang yang dirasakan paling sensitif. Dengan "atas nama" membela etnisnya, seseorang bahkan rela berbuat apapun. Pendek kata, kesetiaan seseorang terhadap etnisnya sangat tinggi.

Menurut H.A.R. Tilaar, etnisitas memiliki berbagai macam perspektif, yaitu:<sup>9</sup>

1. *Perspektif Biologis*

Dalam perspektif ini, etnisitas menunjukkan sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan biologis, seperti wajah, warna kulit, rambut, dan lain sebagainya.

2. *Perspektif Sosial*

Dalam perspektif ini, etnisitas merupakan suatu komunitas, yang mempunyai kesamaan tingkah laku sosial, baik terikat karena hubungan biologis ataupun ikatan-ikatan sosial lainnya yang menyatukan komunitas tersebut.

3. *Perspektif Antropologis*

Dalam perspektif ini, komunitas manusia terutama dilihat dari segi kesatuan budayanya.

4. *Perspektif Politik*

Dalam perspektif ini, etnisitas berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia; Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cet. ke-1, h. 3

nasionalisme. Realitas di tengah masyarakat kita menunjukkan bahwa, kehidupan politik suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh etnisitas, begitupun sebaliknya.

5. *Perspektif Psikologis*

Dalam perspektif ini, etnisitas berkaitan dengan terbentuknya ego seseorang. Sedangkan perkembangan ego atau pribadi seseorang terkait erat dengan kebudayaan di mana seseorang itu hidup atau yang dimiliki oleh komunitas tertentu dengan kebudayaannya yang tertentu pula.

6. *Perspektif Pedagogis*

Dalam perspektif ini, etnisitas dapat memberikan corak kepada perumusan politik pendidikan sehubungan dengan terbentuknya pola-pola kelakuan, pemikiran dalam pertimbangan rasio seseorang yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaannya. Di samping itu juga, pengembangan pendidikan multikultural terkait erat dengan perkembangan paham etnisitas.

Sepertiyang dikemukakan di atas, etnis merupakan salah satu dari sekian kemungkinan identitas yang dimiliki oleh seorang individu. Identitas berdasarkan etnis merupakan sesuatu yang sangat berarti, karena identitas inilah yang sering melekat dan mewarnai pola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita sering mendengar adanya kerusuhan antar etnis yang tidak sedikit memakan korban jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, H.A.R. Tilaar juga mengungkapkan bahwa

rasa solidaritas etnis merupakan dasar dari banyak konflik di dalam sejarah umat manusia.<sup>10</sup> Akan tetapi bukan berarti persoalan etnis identik dengan konflik, masih banyak persoalan-persoalan lain yang menjadi dasar timbulnya konflik sosial.

Etnis seringkali dianggap sebagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui etnis, individu memperoleh identitas kelompok dalam membangun kesadaran keanggotaan dalam kelompok. Atas dasar kelompok itu juga seorang individu bisa berbuat apa saja, apalagi jika kelompoknya merasa terancam.

Oleh karena itu, agar antar etnis ini dapat hidup berdampingan secara damai dan berjalan beriringan, maka perlu dibangun komunikasi dan sikap saling pengertian sehingga interaksi kehidupan masyarakat yang heterogen ini akan terus berjalan.

#### D. Dialog Budaya

Dilihat dari sisi bahasa, budaya berasal dari bahasa Sanskerta "*buddhayah*" bentuk jamak dari *budhi* yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental. *Budhi daya* berarti memberdayakan *budhi* sebagaimana dalam bahasa Inggris dikenal *culture*, (bahasa Latin: *colere*) yang artinya mengolah atau mengerjakan sesuatu (pertanian yang kemudian berkembang sebagai cara manusia mengaktualisasikan rasa (*value*), karsa (*creativity*), dan karya-karyanya (*performances*). Secara praktis, di dalam pemahaman kita tentang

<sup>10</sup> H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia; Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia...*, h. 12

budaya adalah adanya kandungan utama yang antara lain sebagai berikut.<sup>11</sup>

1. Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan hidup, yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku (*the total way of life of a people*).
2. Adanya pola nilai, sikap tingkah laku (termasuk bahasa), hasil karsa dan karya, termasuk segala instrumennya, sistem kerja, teknologi (*a way of thinking feeling, and believing*).
3. Budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan serta proses seleksi (menerima atau menolak) norma-norma yang ada dalam cara dirinya berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan tertentu.
4. Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan (*interdependensi*), baik sosial maupun lingkungan nonsosial.

Raymond William sebagaimana dikutip H.A.R. Tilaar mengungkapkan, bahwa kebudayaan mempunyai banyak arti di antaranya:<sup>12</sup>

1. Kebudayaan sebagai proses intelektual, spiritual, dan estetik dari seseorang individu.
2. Kebudayaan sebagai gaya hidup (*way of life*).

---

<sup>11</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-4, h. 161

<sup>12</sup> H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia; Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia.*, h. 26

3. Kebudayaan sebagai hasil karya dan praktek intelektual khususnya dalam bidang artistik.
4. Kebudayaan sebagai suatu sistem yang signifikan melalui sistem tersebut dikomunikasikan ketertaturan sosial bahkan direproduksi dan dihayati serta dikembangkan oleh individu dan masyarakat.

Dengan mencermati berbagai makna tentang budaya, mempunyai peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Hanya manusia yang berbudaya, yang akan mampu *survive*. Dengan nilai-nilai budaya, seseorang dapat mengembangkan pola hidup kemasyarakatan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Dengan keluhuran nilai-nilai budaya itulah, manusia dapat menjaga eksistensi kemanusiaannya. Dengan demikian, ada beberapa fungsi budaya yang dapat menjadi acuan bagi kita untuk mengembangkan dialog. Taliziduhu Ndraha mengungkapkan fungsi-fungsi budaya sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor, seperti sejarah, kondisi dan sisi geografis, sistem-sistem sosial, politik dan ekonorni, dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat. Perbedaan dan identitas budaya (kebudayaan) dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan di berbagai bidang.
2. Sebagai pengikat suatu masyarakat. Kebersamaan

---

<sup>13</sup> Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 45-46

(*sharing*) adalah faktor pengikat yang kuat seluruh anggota masyarakat.

3. Sebagai sumber. Budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi komoditi ekonomi, misalnya wisata budaya.
4. Sebagai kekuatan penggerak. Jika budaya terbentuk melalui proses belajar-mengajar (*learning process*) maka budaya itu dinamis, resilient, tidak statis, tidak kaku.
5. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah.
6. Sebagai pola perilaku. Budaya berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial.
7. Sebagai warisan. Budaya disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya.
8. Sebagai substitusi (pengganti) formalisasi.
9. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut ini, pembangunan seharusnya merupakan proses budaya.
10. Sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuk *nation-state*.

Pentingnya dialog antar budaya ini didasarkan atas realitas yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Pentingnya dialog ini juga didasarkan atas perkembangan budaya global yang saling memengaruhi, di mana budaya yang

kuat akan memangsa atau menenggelamkan budaya-budaya yang lemah. Pergerakan budaya budaya global ini sudah menjadi peradaban baru masyarakat dunia. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian agar benturan-benturan budaya yang terjadi tidak meluas menjadi konflik sosial yang memecah belah keutuhan bangsa.

### **E. Membangun Dialog Antar Kelompok**

Dalam perkembangan masyarakat yang kian maju, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, setiap kelompok masyarakat dituntut untuk mampu berperan secara lebih aktif dengan tidak menafikan adanya peran dari kelompok-kelompok lainnya. Interaksi sosial harus dibangun berdasarkan sikap positif dan saling menghormati. Interaksi sosial ini merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial selalu didahului oleh suatu kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya interaksi sosial dapat dipengaruhi oleh adanya jarak sosial dari pelaku interaksi itu sendiri.<sup>14</sup> Dengan terciptanya interaksi sosial yang baik, yang mampu menghargai berbagai kelompok yang berbeda, maka masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang, sehingga upaya-upaya untuk memajukan dirinya dapat dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri, maka langkah yang harus diperhatikan

---

<sup>14</sup> Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur; Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), h. 13-14

adalah membina hubungan yang harmonis antara berbagai lapisan masyarakat yang ada, termasuk dengan lembaga-lembaga politik.

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar berbagai kelompok masyarakat, maka diperlukan partisipasi aktif segenap masyarakat terutama para tokoh masyarakat, etnis, agama, budaya, pemuda, dan kalangan terpelajar dalam upaya-upaya sebagai berikut.

1. Memberdayakan peran kelompok-kelompok keagamaan dan etnis serta kelompok-kelompok lainnya, baik dari kalangan terpelajar maupun masyarakat awam dalam melakukan kerja sama di berbagai bidang sehingga antar kelompok masyarakat tersebut dapat menimbulkan kebersamaan.
2. Mengupayakan dialog-dialog dengan semua lapisan masyarakat tentang perlunya kerukunan hidup, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3. Mengefektifkan peran tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan kalangan terpelajar dalam dialog-dialog kemasyarakatan sehingga terjalin komunikasi yang intensif.
4. Masing-masing kelompok tidak menyebarkan permusuhan dalam setiap kegiatan, sehingga mampu memprovokasi kelompok lainnya untuk menebarkan kebencian terhadap kelompok lain.
5. Mengintensifkan komunikasi-komunikasi sosial yang selama ini telah terjalin. Lebih lanjut komunikasi sosial di tengah heterogenitas masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang

harmonis dapat berbentuk dua arah dan multi arah. Keduanya sangat efektif untuk dikembangkan di tengah heterogenitas masyarakat. Dalam hal ini yang terpenting adalah perlunya ditanamkan sikap terbuka di antara anggota masyarakat, saling percaya dan pengertian, saling menghormati, sikap tidak merasa benar sendiri dan menyikapi heterogenitas atau pluralisme sebagai suatu keniscayaan dan kekuatan untuk saling melengkapi. Oleh karena itu pemahaman heterogenitas atau pluralisme tidak cukup hanya dengan mengakui dan menerima bahwa masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, tetapi yang lebih mendasar harus disertai dengan sikap tulus dan ikhlas menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, dan merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam. Dalam hal ini pluralisme juga merupakan suatu perangkat untuk mendorong pemerdayaan budaya bangsa.<sup>15</sup>

#### **F. Pendekatan Pendidikan**

Dengan melihat realitas kehidupan bangsa dan dinamika kemajuan peradaban manusia dewasa ini, pendidikan terasa belum bermanfaat secara maksimal, ketika pendidikan belum mampu menciptakan suatu tatanan sosial yang menghargai kebhinekaan. Menurut Hamzah

---

<sup>15</sup> Nurcholis Madjid, *Cendeklawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. ke-1, h. 62

B. Uno, pendidikan belum mampu menghasilkan manusia yang mampu hidup dalam perbedaan. Mereka tidak memiliki pengalaman belajar dalam kelompok dengan partisipasi integratif, yang masing-masing dapat secara aktif memainkan perannya dalam kelompok itu. Mereka tidak pernah mengalami dan menghadapi perbedaan, juga belum pernah mengetahui cara menyikapi terjadinya perbedaan itu. Seberapa jauh perbedaan itu cukup disikapi dengan toleransi, dan seberapa jauh perbedaan itu perlu disikapi dengan diskusi, dan kapan batas diskusi diakhiri yang penyelesaiannya ditentukan oleh mereka sendiri, mereka tidak memiliki pengalaman.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Hamzah mengungkapkan bahwa belajar dengan pendekatan kelompok memiliki peranan penting. Pendekatan belajar sekarang dirasa masih didominasi dengan belajar kontekstual yang tidak mampu membangun kesadaran dan sikap lebih-lebih tindakan. Pelajaran sejarah yang seharusnya mampu dimanfaatkan sebagai alat pendekatan mengenai karakteristik bangsa masih terlalu menjadi bahan hafalan. Pelajaran geografi yang seharusnya mampu membangun kesadaran kita untuk memahami karakteristik tanah air dan cinta tanah air, juga masih menjadi bahan yang menjadi beban hafalan. Dari proses belajar maupun bahan pelajaran belum mampu membangun sikap dan kesadaran persatuan.<sup>17</sup>

Bagi manusia, pada hakekatnya pendidikan

---

<sup>16</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 12

<sup>17</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia.....*, h. 12

merupakan suatu upaya untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk eksistensi agama dan budayanya. Pendidikan merupakan wahana transformasi nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupannya dengan lebih baik.

Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor penting bagi perjalanan hidup manusia. Bahkan tanpa pendidikan, manusia bisa kehilangan jati diri kemanusiaannya. Dengan pendidikan, manusia belajar menghargai kebhinekaan. Dengan pendidikan juga, manusia belajar memberi dan menerima dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, ketika pendidikan tidak mampu menjalankan fungsi kemanusiaannya, maka eksistensi manusia akan terancam.

Dalam upaya menanamkan budaya dialog yang menghargai perbedaan, maka pengembangan pendidikan atas perbedaan harus ditekankan. Dalam hal ini pola pendidikan multikultural menjadi suatu alternatif untuk dikembangkan, yaitu suatu alternatif pendidikan yang menekankan pemahaman kemajemukan atau kebhinekaan dalam kerangka satu kesatuan yang utuh menuju terwujudnya sikap saling menghormati dan menerima perbedaan dengan tulus dan ikhlas. Pendidikan multikultur juga merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, aliran (agama).<sup>18</sup> Adapun secara lebih jelas tipologi pendidikan

<sup>18</sup> Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur.....*, h. 48

multikultural adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (*cultural difference*).
2. Hubungan manusia (*human relation*). Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial.
3. *Single Group Studies*. Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme akan tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat.
4. Pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas sosial.
5. Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Program ini bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menantang ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Program yang terakhir ini dapat disebut "*Critical Multicultural Education*".

---

<sup>19</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 182

Dengan mengacu pada tipologi-tipologi tersebut, pendidikan seperti ini lebih sesuai untuk suatu keadaan masyarakat yang heterogen sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kita. Pada pendidikan seperti ini juga dapat ditanamkan moral sebagai pedoman peserta didik dalam bergaul dengan sesama dan lingkungan masyarakatnya. Adapun cara menanamkan moral dalam pelaksanaan pendidikan multikultur adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Menumbuhkembangkan dorongan dari dalam yang bersumber dari keyakinan dan takwa.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang moral dan akhlak melalui ilmu pengetahuan, pengalaman, dan latihan agar dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.
3. Meningkatkan kemauan yang menumbuhkan kebebasan pada manusia untuk memilih yang baik dan melaksanakannya,
4. Latihan untuk melakukan yang baik serta mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan perbuatan baik tanpa paksaan.
5. Pembinaan dan pengulangan dalam melakukan perbuatan baik, sehingga menjadi kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara wajar dalam diri manusia.

---

<sup>20</sup> Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur.....*, h. 172-173



**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Saafroedin dan A.B. Tangdililing, (penyunting). 1996. *Integrasi Nasional; Teori, Masalah, dan Strategi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dault, Adhyaksa. 2007. *Membangkitkan Kembali Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Indonesia yang Terpuruk*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Hartaty, Netty, et all. 2004. *Islam dan Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huntington, Samuel P. 2002. *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, terj. M. Sadat Ismail. Cet. ke-4. Yogyakarta: Qalam.
- Kato, Hisanori. 2002. *Agama dan Peradaban*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Madjid, Nurcholis. 1999. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Cet. ke-1. Jakarta: Paramadina.

- Maslikhah. 2007. *Quo Vadis Pendidikan Multikultur; Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*. Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Piliang, Indra J., et all (ed). 2003. *Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Rasyid, Ryaas, et all. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Cet. ke-5*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S.M., Yogie., et all. 2002. *Otonomi Daerah; Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2003. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sirozi, M. 2005. *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sirry, Mun'im A. 2002. *Dilema Islam, Dilema Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia*. Bekasi: Gugus Press.
- Sururin. 2004. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Tasmara, Toto. 2004. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Cet. ke-4. Jakarta: Gema Insani Press.

Tilaar, H. A. R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesia Tera.

\_\_\_\_\_. 2007. *Mengindonesia; Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2004. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

\_\_\_\_\_. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Cet. ke-2. Magelang: Terra Indonesia.

Uno, Hamzah B. 2007. *Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah; Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.